

# **PROGRAM PEMBERDAYAAN KAUM DHUAFa DI BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI RIAU**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)  
pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**Disusun oleh:**

**D E D I**  
**NIM: 10945007806**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## **ABSTRAK**

### **PROGRAM PEMBERDAYAAN KAUM DHUAFA DI BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI RIAU**

Badan Amil Zakat Provinsi Riau adalah suatu badan yang bergerak dibidang pengelolaan zakat. Sebagai sebuah badan yang mengelola salah satu sumber perekonomian dalam Islam ia berusaha untuk memperbaiki dan membantu kehidupan ummat melalui program-programnya yang bertujuan untuk memberdayakan dan memandirikan taraf kehidupan ummat terutama mereka yang lemah dalam segala hal seperti kaum dhuafa.

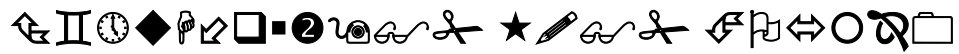
Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang beralamat di jalan Hangtuah Kompleks Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau-Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Riau. yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Program pemberdayaan kaum dhuafa. Populasi dalam penelitian ini adalah badan pelaksana Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang berjumlah 41 orang dan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, berjumlah 8 orang yang terdiri dari ketua BAZ 1 orang, sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang dan anggota bidang Pendayagunaan 5 orang.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara kepada pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau dan Observasi serta dokumentasi. Kemudian penulis melakukan penyajian dan analisis data dalam bentuk Diskriptif Kualitatif yang menggambarkan tentang Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa program pemberdayaan kaum duaafa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan analisis data yang menyajikan bahwa adanya upaya pemberian penguatan pengetahuan dan pendidikan, motivasi dan dorongan, pemberian perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, pemberian bimbingan dan arahan, bantuan usaha atau pekerjaan dan pengawasan terhadap program yang telah dilakukan.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kemampuan dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada *uswatun hasanah*, Rasulullah SAW, dan segenap pengikutnya hingga hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kemampuan dan kerja keras akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau”

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ibunda tercinta Natura dan Ayahnda Heri, yang telah memberikan segala pengorbanan dan bantuan moril dan materil. Kedua adik tersayang Rudi Indra Syafri dan Dewi sartika yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis. Paman penulis Syahman yang selalu membantu penulis dalam hal materil dan sanak saudara penulis yang lainnya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir MA, Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak sekali memberi bimbingan, arahan, dan perbaikan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syahril Romli, M.Ag selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Toni Hartono, M.Si selaku penasehat akademik penulis yang senang dalam berkonsultasi dan senantiasa membantu khususnya kepada penulis dalam segala urusan perkuliahan.
6. Bapak Drs. Zasri M. Ali, MM dan Bapak Zulkarnaini, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
7. Bapak Masduki, M.Ag dan Bapak Rahman, M.Ag. Dosen yang penulis kagumi keilmuannya, yang senang berbagi ilmu dan memberikan nasehat kepada penulis
8. Bapak-bapak, Ibu-ibu para dosen yang telah mengajar dan memotivasi selama penulis kuliah di FDIK, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas perkuliahan ini dengan lancar.
9. Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA. pengagas Forum Diskusi yang selalu penulis ikuti pada tiap malam minggu pertama dan terakhir tiap bulan di rumahnya. Dengan forum tersebut penulis dapat menambah khazanah keilmuan dan pengalaman.

10. Bapak Auni M. Noor dan seluruh pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang telah bersedia menerima dan memberikan informasi serta data kepada penulis.
11. Kakak-kakak tingkat (bang Fathul hadi, DKK) yang ikut memberi dorongan, solusi dan nasehat kepada penulis, sehingga penulis dengan senang hati untuk menulis tugas skripsi ini.
12. Rekan-rekan MD yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, khususnya teman-teman setingkat yang selama ini telah bergaul dengan baik, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berguna bagi bangsa, Negara dan agama.
13. Adinda mahasiswa MD yang senantiasa mendoakan penulis, semoga kebaikan yang kalian lakukan akan mendapat pahala dari Allah SWT.
14. Teman-teman dekat penulis (Firdaus, S.Pd, Junaidi, S.Fil.I, Aditia Pratama, Nurdin, Agus Prabowo, S.Kom.I, Hermawan, S.Kom.I, dll) yang selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis

Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, kritik dan saran yang bersifat membangun tetap penulis harapkan.

*Alhamdulillahirrabil'alamin.*

Pekanbaru, Mei 2013  
Penulis,

**DEDI**  
**NIM. 10945007806**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Alasan Pemilihan Judul .....	6
1.3 Penegasan Istilah .....	6
1.4 Permasalahan .....	8
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.6 Kerangka Teoretis dan Konsep Oprasional .....	10
1.7 Metodologi Penelitian .....	24
1.8 Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
2.1 Sejarah dan Perkembangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau .....	27
2.2 Dasar Hukum .....	28
2.3 Visi dan Misi .....	29
2.4 Makna Lambang .....	30
2.5 Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus .....	31
2.6 Fungsi dan Tugas .....	34
2.7 Program Kerja .....	38

**BAB III PENYAJIAN DATA ..... 44**

3.1 Sistem Pemberdayaan Kaum Dhuafa dalam Pengelolaan Zakat

    Produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Riau ..... 44

**BAB IV ANALISIS DATA ..... 57**

4.1 Sistem Pemberdayaan Kaum Dhuafa dalam Pengelolaan Zakat

    Produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Riau ..... 57

**BAB V PENUTUP ..... 66**

5.1 Kesimpulan ..... 66

5.2 Saran ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia sepanjang sejarahnya, selalu memiliki beberapa kelas (kelompok). Ada kelas atas dan ada pula kelas bawah. Mereka yang berada dikelas atas merupakan kelompok yang paling menentukan. Mereka mampu memainkan peranan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, namun berbeda dengan mereka yang berada dikelas bawah yang biasanya termasuk kelompok yang ditentukan. Mereka ini sering juga disebut kaum dhuafa atau golongan orang miskin.<sup>1</sup>

Islam mengatur hubungan yang indah antar manusia dengan konsep-konsep kemanusiaannya. Islam diturunkan bukan untuk menghilangkan keberadaan para fakir miskin, karena keberadaan si kaya dan si miskin adalah keniscayaan dalam sebuah kehidupan. Islam dengan syariatnya datang untuk mencegah terjadinya jurang kesenjangan yang sangat lebar dan memastikan terjadinya kesejahteraan dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok para fakir miskin. Islam menginginkan setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya agar bisa menikmati kehidupannya serta mampu mendayagunakan segala yang ada dengan sebaik mungkin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Drs. Kadar, M.A, *Pembelaan Al-Quran Kepada kaum Tertindas*, (Jakarta. AMZAH, 2005) hlm: 1

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*, (Jakarta. Zikrul Hakim, terjemahan, cet: 1. 2005) hlm. 25



Disamping itu juga Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan befikir, keluarga, Terlebih jika kemiskinan ini sudah merambah dan merajalela. Bahkan imam Nawawy dalam kitabnya *Faidhul Qadir* mengatakan bahwa ada keterkaitan erat antara kefakiran dengan kekafiran, bahkan dampak dari kefakiran itu bisa merambah kepada kedengkian, kesemuanya ini mampu menodai agamanya dan juga menimbulkan ketidakridhaan atas takdir yang telah ditetapkan dan berakhir pada kekafiran.<sup>3</sup>

Masalah kemiskinan ini sudah menerpa segenap lapisan masyarakat didalam kehidupan kita sehingga ada golongan dari mereka yang dinamakan kaum dhuafa, fakir miskin, atau mustad'afin dan sebagainya yang merupakan tanggung jawab banyak komponen masyarakat. Akan tetapi hal ini yang harus dicari inti atau titik pusat permasalahannya karena kebijakan sosial berbasis pendapatan yang mestipun cukup manusiawi dan bisa dibenarkan bukanlah satu-satunya cara dan bukan pula cara terbaik untuk merancang kesejahteraan dan pemberdayaan dari masalah kemiskinan. Mungkin masih ada pendekatan lain yang secara mendasar dapat mendorong tingkat kesejahteraan orang miskin pada pertumbuhan jangka panjang.<sup>4</sup>

Upaya penaggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui program pemberdayaan yang secara konseptual dapat dilakukan oleh empat jalur strategis, yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial. Strategi perluasan kesempatan ditujukan mencipta

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 27

<sup>4</sup> Michael Sharraden, *Aset Untuk Orang Miskin*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 6

kondisi yang memungkinkan masyarakat miskin memiliki kesempatan luas dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf kehidupan. Strategi pemberdayaan dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam mengambil keputusan dan kebijakan dan mendapatkan hak perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar.<sup>5</sup>

Sebagai *Dien* (way of life) yang lengkap dan sempurna, Islam mengatur kehidupan manusia dari tidur hingga berangkat tidur lagi, dari ubudiyah hingga sosial kemasyarakatan yang utuh dan tak dapat dipisahkan. Termasuk hal kemiskinan yang selama ini menerpa lapisan masyarakat kita. Maka islam memiliki kontribusi terpenting dalam hal ini yakni sistem ekonomi Islamnya, diantaranya Zakat yang merupakan Potensi perekonomian umat yang terpendam.

Kaum dhu'afa seringkali menjadi objek bagi kaum agniya' yang cukup kurang memiliki kesadaran sosial. Jadi zakat sesungguhnya menguji kadar keimanan dan rasa solidaritas sosialnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa tidak untuk melepaskan diri dari pergaulan sosial. Maka dalam hal ini, zakat bukan hanya semata-mata tugas panggilan personal melainkan sebagai panggilan sosial-kemanusiaan.

Bukan tidak mungkin melalui zakat ini jumlah kemiskinan bisa berkurang. Dengan catatan bahwa antara Muzakky dan Mustahiq bisa memutarakan harta itu secara baik. Bagi mustahiq hasil zakat bukan hanya dipahami sebagai pemberian tanpa ada muatan filosofi kehidupan sedikitpun, justru banyak mutan filosofi yang terkandung di dalamnya. Salah satu di antaranya memberikan modal usaha untuk

---

<sup>5</sup> Randi R. Wrihatnolo DKK, *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah pengantar panduan untuk pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta. Elex Media Koputindo: 2007) hlm 33

meningkatkan taraf hidupnya yang cenderung kekuarangan. Dengan zakat itulah mustahiq berkewajiban dapat mengelola secara profesional dan bukan digunakan secara tidak bijak dan bermanfaat.

Sesungguhnya sisi sosial dari sasaran Zakat jelas tidak diragukan lagi seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang lemah, fakir, miskin dan sebagainya yang memiliki dampak social termasuk dalam memberdayakan para fakir miskin atau kaum dhuafa dengan perintah zakat yang disyariatkan. Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan social yang ditawarkan Islam dimana aturan itu tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit dan spesipik, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok-kelompok orang yang lemah dan fakir.<sup>6</sup>

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Provinsi Riau, merupakan salah satu badan yang mengelola zakat mempunyai Visi mengelola Zakat dengan Amanah dan Profesional, dan Misi meningkatkan Taraf Hidup Mustahik melalui Pemberdayaan sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi ummat.<sup>7</sup> Selain itu juga Badan Amil Zakat Provinsi Riau memiliki program kerja yang cukup bagus dan sesuai untuk pemberdayaan kaum dhuafa. Diharapkan dari Badan ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai bagi ummat khususnya mereka para kaum dhuafa yang perlu diberdayakan dari berbagai kesulitan hidup yang mereka hadapi.

Dilihat dari misi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan siapakah yang dimaksud oleh badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam pemberdayaan sumberdaya

---

<sup>6</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor. Pustaka Litera AntarNusa, cet: 12. 2011) hlm. 878

<sup>7</sup> Badan Amil Zakat Provinsi Riau, *Buku Profil*, 2011

manusia. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut salah satu SDM yang dimaksud adalah Kaum Dhuafa yang menjadi mustahik di Badan Amil Zakat tersebut. hal ini tertera dalam Sub-sub program yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang memuat program untuk Memberdayakan Kaum Dhuafa.

Berangkat dari gejala-gejala dan permasalahan yang tercantum didalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan ini kedalam suatu karya ilmiah, dengan judul:

**“ Program Pemberdayaan Kaum Dhu’afa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau ”**

## **1.2 Alasan Pemilihan Judul**

- a. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena ingin melihat bagaimana program pemberdayaan BAZ Riau dalam menaggulangi masalah kemiskinan terutama kaum Dhuafa
- b. Dari segi waktu, biaya, tenaga, dan sarana prasarana lainnya penulis mampu dan mudah untuk melaksanakannya
- c. Secara substansial dan objeknya judul ini belum pernah diteliti pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya Jurusan Manajemen Dakwah

## **1.3 Penegasan Istilah**

### **a. Program**

Program adalah Rencana atau Rancangan yang disusun secara terorganisir untuk melakukan kegiatan.<sup>8</sup>

### **b. Pemberdayaan**

Pemberdayaan (empowerment), yaitu “Sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemberdayaan juga memiliki makna melindungi dan membela dengan cara berpihak kepada yang

---

<sup>8</sup> Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya. Apollo, 2004) hlm. 515

lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.<sup>9</sup>

### **c. Kaum Dhuafa**

Secara bahasa Dhuafa berasal dari bahasa Arab yakni *Dh'afan* atau *Dhi'afan* yang bearti orang-orang yang lemah atau tertindas. Dalam beberapa ayat Al-Quran dhuafa disebut sebagai *Mustadh'afin*. Diantaranya dalam surah al-Qasash ayat 5 yang artinya “ dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas “

Secara Harfiah kaum Dhuafa adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan tiada putus.<sup>10</sup>

### **d. Badan Amil Zakat Provinsi Riau**

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang berdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.<sup>11</sup> Badan Amil Zakat Provinsi Riau adalah Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infaq dan shadaqah di Provinsi Riau yang mengacu kepada UU No. 38 Tahun 1999.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S.. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta. CSIS. 1996) hlm. 97

<sup>10</sup> Drs. Muksin. M.K., S.Ag., M.sc, *Menyayangi Dhuafa*, (Jakarta. Gema Insani Press, 2004) cet: 1 hlm. 11

<sup>11</sup> Maulatul Maghfutoh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007) hlm. 97

<sup>12</sup> Badan Amil Zakat Provinsi Riau, *Profil*, 2011

## **1.4 Permasalahan**

### **a. Identifikasai Masalah**

- 1) Bagaimana program yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam memberdayakan kaum dhuafa?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan kaum dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau?
- 3) Apakah program pemberdayaan kaum dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau sudah berjalan efektif?
- 4) Apa saja bentuk program yang dibuat dalam upaya pemberdayaan kaum dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau?

### **b. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yakni “Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau”

### **c. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau?

## **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan**

Untuk mengetahui Bagaimana Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau

#### **b. Kegunaan**

- 1) Untuk mendapatkan gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada badan Amil Zakat Provinsi Riau
- 3) Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca

### **1.6 Kerangka Teoretis dan Konsep oprasional**

#### **a. Kerangka Teoretis**

##### **1) Pemberdayaan**

Pemberdayaan (*empowerment*), yaitu “Sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemberdayaan juga memiliki makna melindungi dan membela dengan cara berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.”<sup>13</sup>

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada

---

<sup>13</sup> Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S, *Op,cit.*, hlm. 97



kemandirian. Menurut Edi Suharto Pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

- a. Pemungkinan (*enabling*) adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
- b. Penguatan (*empowering*) yakni memperkuat pengetahuan dan pendidikan agar kemampuan yang dimiliki masyarakat dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- c. Perlindungan (*protecting*) yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
- d. Penyokongan (*supporting*) yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan (*fostering*) yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.<sup>14</sup>

Hal senada disampaikan oleh Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho bahwa pemberdayaan adalah memiliki sederetan upaya-upaya yakni:

1. Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang dilakukan secara sengaja dan terukur. Upaya yang dilakukan secara sengaja dan terukur artinya terdapat strategi, mekanisme, dan tahap yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan mereka yang berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu.
2. Pemberdayaan adalah upaya memberikan pemihakan yang berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan. Upaya pemihakan utamanya dilakukan dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dan mencegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah.
3. Pemberdayaan adalah upaya melindungi yang lemah. Melindungi yang lemah diperlukan akibat penguasaan asset produktif yang tidak seimbang. Upaya perlindungan dapat dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang

---

<sup>14</sup> Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung. PT Refika Aditama, 2005) hlm. 205

lemah melalui pelaku ekonomi rakyat, karena pelaku ekonomi adalah fudemen kekuatan kemandirian suatu bangsa.<sup>15</sup>

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran terhadap masyarakat, maka ia akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas diri
- b. Tahap transpormasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecekapan dan keterampilan agar terbuka wawsan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecekapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar kepada kemandirian.<sup>16</sup>

Dalam upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan *mikro*. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*)

---

<sup>15</sup> Randi R. Wrihatnolo DKK, *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah pengantar panduan untuk pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta. Elex Media Koputindo: 2007) hlm 205

<sup>16</sup> Ambar Tegar Sulistiani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta. Gava Media: 2004) hlm.83

2. Pendekatan *mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
3. Pendekatan *makro*. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.<sup>17</sup>

Keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kehendak. Hal ini bukan hanya dapat mengontrol perbuatan-perbuatan atau kemampuan-kemampuan lain. Kehendak dapat memutuskan atau menentukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan, tetapi kehendak tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Kehendak hanyalah berlandaskan pada pemikiran kognitif (akal atau rasio), sedangkan tindakan berlandas pada pemikiran konatif (karsa) pada setiap manusia.

Komponen utama pemberdayaan yang dimaksud disini adalah anggota organisasi, pemerintah dan masyarakat. Tujuan atau makna pemberdayaan ini meliputi :

---

<sup>17</sup> Suharto Edi , *Op.cit.*, hlm. 220

- a. Menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri anggota organisasi, pemerintah, maupun anggota masyarakat. Kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi berbagai hambatan atau tantangan hidup dapat melahirkan kekuatan dan ketahanan diri untuk tidak menggantungkan harapannya kepada pihak lain.
- b. Memiliki kegesitan dan proaktif, pemberdayaan manusia dapat menciptakan kegesitan memiliki daya dorong untuk proaktif mencari kegiatan yang dapat lebih menguntungkan.
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan merupakan sumber keterampilan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang hasilnya lebih menguntungkan.
- d. Kepatuhan dan kesadaran, kehidupan manusia senantiasa diatur oleh suatu ketentuan hidup yang perlu ditaati dan sadar untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan, baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam pergaulan. Kepatuhan dan kesadaran terhadap norma-norma sebagai fundamental kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berumah tangga, dan sebagainya menjadi terapi yang tepat serta mosaik dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup>

Dalam konsep pemberdayaan menampakkan dua kecenderungan yakni sebagai berikut :

1. Pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat,

---

<sup>18</sup> Makmur, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta. Bumi Aksara, 2007) hlm. 120

organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.<sup>19</sup>

Sebagai sebuah proses Pemberdayaan memerlukan Pengawasan yakni kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi, dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Di lain pihak, pengawasan juga dimaksudkan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal yang bersangkutan guna menghadapi tantangan pembangunan secara menguntungkan.<sup>20</sup>

Tujuan umum pengawasan adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk:

- a. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh

---

<sup>19</sup> Sudarmayanti, *Rekonstruksi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk menghadapi Dinamika perubahan lingkungan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm. 75

<sup>20</sup> Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005) hlm. 91

- b. Mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar yang diharapkan
- c. Mengkaji kesesuaian tindakan aktor yang terlibat sesuai fungsinya di semua tingkatan;
- d. Mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, baik positif maupun negative
- e. Memperoleh rekomendasi kebijaksanaan;
- f. Membangun sistem monitoring yang dapat diandalkan untuk program pembangunan selanjutnya.<sup>21</sup>

## 2) Kaum Dhuafa

Secara bahasa Dhuafa berasal dari bahasa Arab yakni *Dh'afan* atau *Dhi'afan* yang bearti orang-orang yang lemah atau tertindas. Secara Harfiah kaum Dhuafa adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan tiada putus.<sup>22</sup>

Mereka baru dapat dikategorikan sebagai kaum dhuafa apabila dalam kenyataan hidupnya mereka mengalami hal-hal berikut ini:

*Pertama*, berada dalam kesulitan ekonomi dan kesengsaraan. *Kedua*, penderitaan yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja. *Ketiga*, dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 95

<sup>22</sup> Drs. Muksin. M.K, *Op.cit.*, hlm. 1

keadaan tidak berdaya baik fisik maupun mental. Dan *keempat*, dalam keadaan tertindas karena terintimidasi, dizalimi, dieksploitasi, atau dijajah.<sup>23</sup>

Kaum dhuafa yang hidup dalam masyarakat terdiri dari berbagai ragam dengan permasalahan social dan ekonomi yang berbeda-beda. Penyebab mereka termasuk dalam golongan dhuafa adalah:

1. karena lemah ekonomi
2. hidup mereka bergantung dari belas kasihan orang lain.
3. tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan.
4. karena menderita atau mendapat musibah yang menimpa diri atau keluarga mereka.
5. karena tidak mampu lagi mencari rezeki.
6. karena tidak memiliki tempat menetap atau yang permanen.
7. karena berada dalam tahanan sementara keluarganya dalam keadaan sulit.
8. karena sudah uzur dan lemah.
9. karena kehilangan mata pencaharian.
10. karena penghasilannya rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarganya.
11. karena hidupnya bergantung pada alam dan tidak setiap hari mereka mendapatkan hasil dari alam tersebut. *Kedua belas*, karena kehabisan bekal dalam perjalanan, *Ketiga belas*, karena hidupnya terlantar atau ditelantarkan oleh orang tua atau keluarganya. Dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 2



12. karena di PHK dan lain-lain.<sup>24</sup>

Kaum duafa yang terdapat dala masyarakat terbagi dalam beberapa ragam yakni sebagai berikut:

1. Anak Yatim, yakni anak yang masih kecil namun sudah menderita karena ditinggalkan oleh orang tuanya.
2. Fakir Miskin, yakni dua subjek dari kaum duafa yang dua-duanya berada dalam keadaan tidak mampu dan tergolong dalam ekonomi lemah.
3. Pengemis, yankni orang yang meminta-minta atau orang yang mengharap bantuan dari orang lain yang benar-benar lemah ekonominya.
4. Tunanetra, yakni orang yang mengalami cacat kebutaan yang disebabkan kecelakaan atau bawaan dari lahir sehingga mereka tidak dapat berusaha.
5. Kaum Cacat, yakni mereka yang mengalami cacat fisik lainnya baik fisik maupun mental walaupun mereka masih dapat berusaha namun memerlukan bantuan orang lain.
6. Ibnu Sabil, yakni orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.
7. Manula, yakni orang-orang yang lanjut usia atau lebih dikenal dengan kaum jompo
8. Mualaf, yakni orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bimbingan secara mental dan termnasuk golongan yang menerima zakat.
9. Orang sakit, yakni orang yang terkena musibah atau penyakit dan ujian dari Allah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 77

10. Buruh, yakni kaum yang sehari-hari mengharap upah untuk memenuhi kebutuhan hidup
11. Petani. Yakni orang yang menggantungkan hidup dari hasil bumi atau pertanian mereka terutama mereka yang tinggal diperdesaan
12. Nelayan, yakni golongan orang yang juga bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>25</sup>

Kaum dhuafa adalah orang-orang yang lemah dan tertindas, akibatnya mereka mudah diperdaya, dizalimi, dan diperlakukan sewenang-wenang. Mereka tentu memerlukan perhatian, bantuan, pertolongan, perlindungan, dan pembelaan dari orang lain yang memiliki kelebihan. Misalnya memberikan pemberdayaan kepada mereka. Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan tersebut adalah:

- a. Membangkitkan harga diri kaum dhuafa, membangkitkan harga diri ini dapat dilakukan sepertimana yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. adalah dengan cara mendekatkan diri dan bergaul dengan mereka. Mereka perlu mendapatkan perhatian, penghargaan, pujian, kegembiraan, kemuliaan, doa, kasih sayang dan lainnya.
- b. Memberikan motivasi, hal ini diperlukan untuk memacu semangat berusaha dan bekerja bagi kaum dhuafa.
- c. Memberikan pekerjaan, agar kaum dhuafa dapat keluar dari masalahnya mereka perlu diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
- d. Memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, yakni dalam bentuk perlindungan jiwa, harta, harga diri, hak-hak dan masa depan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 78-109

- e. Memberikan pendidikan, yakni kebutuhan dasar mereka untuk menanggulangi kebodohan dan keterbelakangan mereka.
- f. Memberikan jaminan dan bantuan social, yakni bantuan atau jaminan yang dapat dilakukan dengan bantuan zakat, infak, sodaqoh, dan lainnya.<sup>26</sup>

### 3) Badan Amil Zakat Provinsi Riau

Sebelum membahas lebih lanjut tentang organisasi atau pihak yang mengelola zakat atau yang lebih dikenal badan atau lembaga amil zakat, perlu dipahami dahulu makna dan bentuk zakat itu sendiri.

Secara bahasa kata Zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang bearti berkah, tumbuh dan baik. Jika ditunjukkan kepada sesuatu *zaka* bearti tumbuh dan berkembang, dan ditunjukkan kepada seseorang *zaka* bearti orang itu baik.<sup>27</sup> Secara istilah fiqih Zakat bearti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping itu juga ia bearti mengeluarkan sebagian harta tertentu.<sup>28</sup>

Zakat terbagi kepada dua bentuk yakni:

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa. Zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fatur* (berbuka puasa)<sup>29</sup> oleh sebab itu zakat fitrah dikeluarkan pada bulan puasa.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qorodowi, *Hukum Zakat, Op.cit.* hal. 34

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 920

## 2. Zakat Mall

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta. dimana harta yang dimaksud harus mencukupi nisab dan haulnya. Adapun harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat adalah :

- a. Emas dan perak
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa, dan
- g. Rikaz<sup>30</sup>

Dari dua jenis zakat tersebut zakat mall merupakan zakat yang bisa dikembangkan dan tentunya memerlukan sebuah badan yang mengelolanya yakni Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang berdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.<sup>31</sup> Badan Amil Zakat Provinsi Riau adalah Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infaq dan shadaqah di Provinsi Riau yang mengacu kepada UU No. 38 Tahun 1999.<sup>32</sup>

Secara ketentuan hukum Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau Berdiri Berdasarkan hukum dan Undang undang yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang  
Pengelolaan Zakat

---

<sup>30</sup> Asnaini, S.Ag, M.Ag, *Zakat Produktif dalam perspektif islam*, *Op.cit.*, hal 37

<sup>31</sup> Maulatul Maghfutoh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007) hlm. 97

<sup>32</sup> Badan Amil Zakat Provinsi Riau, *Profil*, 2011

2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 66/I/2010 <sup>33</sup>

Badan Amil Zakat Provinsi Riau memiliki Visi “Mengelola Zakat Secara Profesional” dan misi untuk memberdayakan Sumberdaya Manusia yang kemudian diwujudkan melalui program yang telah dibuat yakni: Riau sehat, Riau Peduli, Riau Takwa, Riau Makmur dan Riau Cerdas. Yang bertujuan ntuk memberdayaakan taraf kehidupan ummat terutama mereka yang lemah atau kaum dhuafa.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

<sup>34</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

### **b. Konsep oprasiaonal**

Konsep oprasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teori. Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman maka untuk mengetahui bagaimana Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau dapat di lihat dari indicator-indikator sebagai berikut:

- b. Adanya upaya penguatan pengetahuan dan pendidikan sebagai langkah awal
- c. Adanya upaya pemberian perlindungan terhadap jiwa, harta, kedudukan mereka ditengah masyarakat dan pemenuhan kebutuhan sandang pangan.
- d. Adanya pemberian motivasi dan dukungan untuk tetap bersemangat dan memiliki etos kerja yang kuat dalam menjalani kehidupan
- e. Adanya pemberian bimbingan dan pelatihan yang memungkinkan potensi mereka berkembang dan memiliki skil
- f. Adanya pemberian bantuan usaha atau pekerjaan sebagai bentuk implementasi dari usaha yang dilakukan sebelumnya
- g. Adanya pengawasan yang continue terhadap usaha yang telah dilakukan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **a. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang beralamat di jalan Hangtuah Kompleks Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau-Pekanbaru.

### **b. Subjek dan Objek penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah badan pelaksana Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Program pemberdayaan kaum dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

### **c. Populasi dan sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau yang berjumlah 41 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*<sup>35</sup> mengambil 8 orang yang terdiri dari ketua BAZ 1 orang, sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang dan anggota bidang Pendayagunaan 5 orang

### **d. Sumber data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>35</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. 12. 2011) Hlm. 300 Lihat Prof.Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta. Rineka cipta: 2010 ) hlm. 183

#### **e. Teknik pengumpulan data**

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) cara diantaranya:

1. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis dengan Responden.<sup>36</sup>
2. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung melihat kondisi BAZ tersebut mengenai Program pemberdayaan kaum dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau
3. Dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan permasalahan penelitian tersebut.

#### **f. Teknik analisa data**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>37</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan penyajian diatas, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian *Deskriptif Kualitatif*, yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya, dan kemudian data tersebut dianalisa tidak dalam bentuk angka.

---

<sup>36</sup> Sukandarrumidi.. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2006) hlm. 194

<sup>37</sup> Moh. Nazir, Ph.D. *Metode Penelitian*. (Jakarta. Ghalia Indonesia.2003). hlm. 347



## **1.8 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi tentang, latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, , identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang, sejarah, Visi dan Misi , Struktur Organisasi, struktur Organisasi, dan Program Kerja Badan Amil Zakat Provinsi Riau

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

Pada bab ini berisikan penyajian data tentang Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau

### **BAB IV ANALISIS DATA**

Pada bab ini berisikan analisis data tentang program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab lima ini berisikan tentang kesimpulan, dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **2.1 Sejarah dan Perkembangan Badan Amil Zakat Provinsi Riau**

Badan amil zakat provinsi riau adalah Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infaq dan shadaqah di Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 532/XII/1987 dan Nomor Kpts. 533/XII/1987 Tanggal 12 Desember 1987 dengan nama Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal atau di singkat BAZISMAL Provinsi Riau.<sup>1</sup>

Pada tahun 1991 keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang pembinaan Zakat. Atas dasar keputusan Bersama tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts. 657/X/1992 tanggal 8 Oktober 1992 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Riau periode tahun 1992-1997. Setelah berakhir masa kerja Pengurus BAZIS Provinsi Riau periode tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh Pengurus BAZIS Riau periode tahun 1998-2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998. Namun pada tahun 1999 disahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Atas dasar itu pula kepengurusan BAZIS Provinsi Riau menyesuaikan dengan maksud undang-undang tersebut, maka nama BAZIS Provinsi Riau berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

Untuk pertama kali kepengurusan BAZ Provinsi Riau mengacu kepada UU No. 38 Tahun 1999 adalah kepengurusan BAZ Provinsi Riau periode 2000-2003 dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 263/VI/2000. Selanjutnya kepengurusan BAZ Provinsi Riau dari periode ke periode tetap mengacu kepada UU No. 38 Tahun 1999.<sup>2</sup>

## **2.2 Dasar Hukum**

Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau Berdiri Berdasarkan hukum dan Undang undang yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 66/I/2010 <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

<sup>3</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

## 2.3 Visi Dan Misi

### 1. Visi

Terwujudnya Badan Pengelola Zakat Yang Amanah Dan Profesional Di Provinsi Riau”

### 2. Misi

- a. Mewujudkan manajemen yang modern, profesional dan transparan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah
- c. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi umat
- d. Menjangkau muzakki dan mustahiq yang seluas-luasnya
- e. Mengembangkan budaya memberi lebih baik dari pada meminta dikalangan umat islam <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

## 2.4 Makna Lambang Badan Amil Zakat Provinsi Riau

### a. Lambang<sup>5</sup>



### b. Makna Terperinci<sup>6</sup>

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Segi Delapan : Simbol dari delapan (8) Asnaf.</li><li>2. Padi 17 Butir &amp; Kapas 5 Buah : Melambangkan raka'at shalat dan waktu shalat serta simbol kesejahteraan dhuafa.</li><li>3. Lancang Kuning : Simbol dari Provinsi Riau sebagai wilayah kerja dari Badan Amil Zakat Provinsi Riau.</li><li>4. Gelombang 4 Baris : Melambangkan bahwa zakat adalah rukun yang ke-4 dari Rukun Islam dan juga bermakna 4 sunghai besar di Riau serta air lambang kehidupan.</li><li>5. Bintang : Simbol Ketuhanan Yang Maha Esa serta Ruku Islam.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Tangan di atas: simbol dari MUZAKKI dan Tangan di bawah: simbol dari MUSTAHIQ.</li><li>7. Warna Merah, Kuning, dan Hijau : Lambang warna adat Melayu (warna tabir-tabir orang Melayu pada acara-acara adat).</li><li>8. Warna Hijau : Melambangkan kesuburan dan kehidupan serta kesejukan.</li><li>9. Warna Kuning : Melambangkan keagungan dan kebesaran.</li><li>10. Warna Putih : Melambangkan kesucian dan keikhlasan serta kejujuran.</li></ol>
--	--

### c. Makna keseluruhan<sup>7</sup>

*“ Zakat adalah rukun Islam yang keempat merupakan perintah bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai ketentuan agama Islam kepada delapan (8) Asnaf yang berhak menerimanya. Zakat akan membangun rasa kesetiakawanan antara yang tidak mampu dengan yang mampu untuk merealisasikan kesejahteraan bersama dalam mewujudkan kejayaan Islam di Bumi Lancang Kuning”.*

<sup>5</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

<sup>6</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

<sup>7</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

## **2.5 Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Baz Provinsi Riau**

### **a. Struktur Organisasi**

b. Susunan pengurus

1. Dewan Pertimbangan

Ketua	: Gubernur Riau
Wakil Ketua	: Ketua DPRD Provinsi Riau
Sekretaris	: KA. Kanwil Depag Prov. Riau
Wakil Sekretaris	: Rektor UIN Suska Riau
Anggota	: DR. H. Mustafa Umar, MA
Anggota	: Ir. H. Zulkifli Saleh
Anggota	: Drs. H. Yusuf Ahmad

2. Komisi Pengawas

Ketua	: Drs. H. Wan Syamsir Yus
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Mahdini, MA
Sekretaris	: Drs. H. Said Saqlul Amri
Wakil Sekretaris	: Prof. Dr. H. Irwan Efendi, M. Sc
Anggota	: Drs. H. Bin Fadjri
Anggota	: Dr. Heri Sunandar, MCL
Anggota	: Dr. H. Marwan Awaloeddin

3. Badan Pelaksana

Ketua	: Drs. H. Auni M. Noor, M.Si
Wakil Ketua I	: H. Azwar Aziz, SH. M.Si
Wakil Ketua II	: Drs. H. Jalaluddin
Sekretaris	: Drs. H. Syamsul
Wakil Sekretaris I	: Drs. H. Irhas

Wakil Sekretaris II : Marila, S.Ag

Bendahara : Mahmud M, Bc. Hk

Pada badan pelaksana terdapat bidang-bidang yang merupakan bagian dari susunan badan pelaksana. Yaitu:

1. Bidang Pengumpulan

Ketua : H. Fajeriensyah, Lc. MA

Sekretaris : Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. MA

Anggota : H. Heri Indra Putra, SE

Anggota : H. Soeripto Hasan

Anggota : Drs. H. Sukmadi Mukmin

2. Bidang Pendistribusian

Ketua : Drs. H. Zulkifli

Sekretaris : Muhammad Yunus, SHI

Anggota : Ardison, S.Ag

Anggota : H. Hamdan Yahfiz, S.Pdi

Anggota : H. Hasan Amal

3. Bidang Pendayagunaan

Ketua : Drs. H. Syahrial ali, M. Ag

Sekretaris : Jamhur Rahmat, lc. Ma

Anggota : Drs. Ahmad Syafruddin, MA

Anggota : Musliadi, s.ag

Anggota : Bahruslim



#### 4. Bidang Pengembangan

Ketua	: Drs. H. Ahmad supardi, MA
Sekretaris	: Edi Ahmad, SIP, MAP
Anggota	: H. Abdul Somad, lc. MA
Anggota	: Abdul Wahid, S.Ag
Anggota	: Dr. H. Abdul Razak, MM <sup>8</sup>

#### 2.6 Fungsi dan Tugas BAZ Provinsi Riau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 8 dan 9 tugas pokok Badan Amil Zakat adalah :

1. Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (BAZ Provinsi Riau ke Gubernur Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau)

Namun dari pada itu masing-masing satuan pada Kepengurusan Badan Amil Zakat memiliki fungsi dan tugas tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

##### a. Dewan Pertimbangan

Fungsi :

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat

---

<sup>8</sup> Dokumentasi tgl, 4 Januari 2013

Tugas :

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Komisi Pengawas

Fungsi :

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Tugas :

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
5. Menunjuk akuntan publik.

c. Badan Pelaksana

Fungsi :

Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Tugas :

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

Didalam badan pelaksana terdapat bidang-bidang yang mempunyai tugas masing-masing yaitu:

a. Bidang Pengumpulan

Tugas:

1. Mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah baik dari perorangan maupun badan.
2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (seperti bank, perusahaan dll) di wilayah kerjanya dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atau perusahaan atas persetujuan muzakki.
4. Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dan lain-lain.

b. Bidang Pendistribusian

Tugas:

1. Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
2. Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas di wilayahnya.
3. Menyalurkan zakat dapat bersifat bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak (darurat).
4. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat.

c. Bidang Pendayagunaan

Tugas :

1. Menyalurkan zakat yang bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq baik secara perorangan maupun kelompok melalui program yang berkesinambungan.
2. Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
  - b. Menetapkan jenis usaha produktif.
  - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
  - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
  - e. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan.
3. Memprioritaskan mustahiq yang akan beru saha yang berpeluang menguntungkan.
  4. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan mendapatkan zakat untuk usaha produktif.
- d. Bidang Pengembangan

Tugas :

1. Melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat.
2. Memberikan informasi dan edukasi tentang zakat.
3. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak tentang zakat.
4. Melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan tentang zakat dan fiqih zakat.<sup>9</sup>

## **2.7 Program Kerja BAZ Provinsi Riau**

### **1. Program Riau Taqwa<sup>10</sup>**

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan masyarakat, Adapun bentuk dari program ini sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

<sup>10</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

- a. Menempatkan guru-guru agama di daerah terisolir dan komunitas suku-suku terkebelakang ( Bonai, Sakai, Talang Mamak, Suku Laut, dan sebagainya ) yang mendapatkan gaji/Honor tetap dari BAZDA Riau
- b. Memberikan bantuan peralatan/sarana pendidikan kepada sekolah-sekolah agama, rumah ibadah, pondok pesantren, rumah suluk dan lain-lain dari dana Infaq dan Shadaqah.
- c. Melakukan diklat-diklat bagi para calon Muballigh maupun Muballighah muda dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta salah satu cara untuk meramaikan masjid serta kebutuhan masa depan.
- d. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat melalui organisasi kemasyarakatan maupun melalui institusi-institusi pemerintah, swasta, dalam bentuk ceramah-ceramah agama, majelis tabligh akbar, diskusi-diskusi, seminar-seminar, serta bentuk-bentuk lainnya yang dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama (khususnya Islam) yang tentunya akan meningkatkan kesadaran, motivasi yang tinggi dalam menjalankan Rukun Islam serta ilmu tentang zakat, infaq, dan shadaqah.
- e. Bekerjasama dengan masjid-masjid dalam pengumpulan peralatan sholat dan buku-buku agama baik yang baru maupun yang bekas yang akan disalurkan/di distribusikan kepada kaum du'afa yang berada di daerah-daerah miskin/terisolir se Provinsi Riau. Dalam hal ini juga akan diikuti dengan penyaluran dan pendistribusian ternak Qurban untuk para kaum du'afa sebagaimana tersebut diatas.

## 2. Program Riau Peduli <sup>11</sup>

Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai macam daerah, yang sering terjadi di Provinsi Riau, baik yang di Kabupaten/Kota dan tempat-tempat lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti Memberikan bantuan kepada kaum muslimin dan muslimat (termasuk kaum du'afa) yang mendapatkan musibah bencana alam (gempa bumi, tsunami, kebakaran, longsor, banjir dan lain-lain) dalam berbagai bentuk/jenis bantuan yang dibutuhkan oleh yang mengalami musibah tersebut. seperti:

- a. Bantuan sembako
- b. Bantuan tenda pengungsian
- c. Bantuan pengobatan Gratis
- d. Bantuan dapur umum
- e. Bantuan ambulance/transportasi
- f. Bantuan air bersih
- g. Bantuan pakaian baru atau bekas, dan Lain-lain

Kalau dana memungkinkan akan diberikan juga bantuan perbaikan rumah ibadah yang rusak akibat bencana tersebut

## 3. Program Riau Makmur<sup>12</sup>

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi mustahiq Antara lain :

---

<sup>11</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

<sup>12</sup> Dokumentasi, tgl 4 Januari 2013

- a. Memberikan bantuan modal produktif bagi para mustahiq/du'afa yang masih bisa berusaha dalam berbagai jenis usaha.
- b. Memberikan bimbingan/keterampilan dalam bentuk pendidikan/ penataran serta pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang usaha dan kegiatannya, termasuk pembinaan moral dan akhlaq.
- c. Bekerjasama dengan Dinas/Badan/Kantor disektor pemerintahan dan institusi-institusi swasta lainnya dalam program-program/kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan kaum dhu'afa ( mustahiq ) secara keseluruhan
- d. Memberikan bantuan yang bersifat konsumtif( sandang, pangan serta papan ), kepada para mustahiq yang tidak bisa berusaha karena uzur, sakit-sakitan, cacat, dan lain-lain.
- e. Menciptakan lahan produktif bagi para petani/buruh tani/nelayan/ peternak dengan membuka lahan pertanian, kolam ikan, pemberdayaan ikan sungai dan danau serta perikanan laut, kawasan peternakan, dan lain-lain.
- f. Pemberdayaan pemulung dan anak jalanan dengan meningkatkan taraf kehidupannya yang mandiri dan sejahtera.

#### 4. Program Riau Cerdas

Program ini tujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Seperti :

- a. Memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak kaum du'afa dan asnaf lain dengan prinsip tidak ada lagi anak-anak orang miskin (kaum du'afa)



yang tidak bersekolah dan program ini dilanjutkan dengan program SKSS (satu keluarga miskin satu sarjana).

- b. Mendirikan rumah-rumah baca di daerah-daerah/kantong-kantong kemiskinan dalam meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat yang berada di daerah kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan.
- c. Memberikan keterampilan-keterampilan bagi kaum du'afa (tidak mampu) dalam berbagai jenis/bentuk baik bagi laki-laki maupun perempuan yang akan dilaksanakan bersama BAZ center (pusat diklat kaum du'afa).
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain yang berfungsi sebagai diklat-diklat keterampilan untuk memberikan keterampilan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh BAZDA Riau.
- e. Memberikan bantuan peralatan sekolah dan pendidikan lainnya seperti tas sekolah, baju seragam, buku tulis dan lain-lain kepada anak-anak kaum du'afa.

#### 5. Program Riau Sehat

Program ini ditujukan untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma untuk du'afa dan miskin, seperti :

- a. Memberikan bantuan berobat baik di Puskesmas, RSUD dan tempat-tempat lain yang sejenis dalam bentuk :
  - 1. Biaya obat
  - 2. Biaya perawatan
  - 3. Biaya Transportasi

4. Biaya Akomodasi/konsumsi
  5. Biaya persalinan
  6. Biaya lain-lain yang terkait dengan kesehatan bagi kaum du'afa dan asnaf-asnaf lainnya.
- b. Melakukan pengobatan gratis di daerah-daerah/kantong-kantong kemiskinan dengan mendirikan posko-posko di halaman masjid atau tempat-tempat lainya di desa/lokasi tersebut
  - c. Melakukan sunat massal bagi anak-anak mustahiq (tidak mampu) ditempat-tempat yang dibutuhkan masyarakat baik dipedesaan maupun maupun diperkotaan.
  - d. Memberikan bantuan peralatan kesehatan seperti:kaca mata, kursi roda, alat bantu dengar, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh para mustahiq tersebut.
  - e. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah timbulnya wabah penyakit, serta menjaga kesehatan bagi seluruh masyarakat ( termasuk para kaum du'afa ) serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan segar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Dokumentasi tgl 4 Januari 2013

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

##### **3.1 Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau**

Pada bab ini data yang disajikan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Adapun tehnik yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden, observasi dan didukung oleh data yang didapatkan melalui dokumentasi.

Wawancara yang penulis lakukan yakni dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada responden, yang berkaitan dengan kajian yang sedang penulis teliti, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian ini.

Observasi penulis lakukan untuk mendapat hasil yang lebih akurat untuk mendukung data yang penulis dapatkan melalui wawancara yang penulis anggap masih memerlukan pembuktian secara praktik nya.

Dokumentasi yang diambil untuk mendapat kan data-data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian.

Setelah penulis mendapatkan data dari hasil penelitian maka penulis dapat menyajikan data sebagai berikut:

#### **a. Penguatan Pengetahuan dan Pendidikan**

Penguatan pengetahuan dan pendidikan adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan dalam pemberdayaan kaum dhuafa, faktor pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang dalam menyikapi persoalan hidup. Penguatan pengetahuan dan pendidikan bagi kaum dhuafa bertujuan untuk membangkitkan potensi dan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah mereka. Dalam hal ini Badan Zakat Provinsi Riau memiliki beberapa cara dalam memberikan penguatan pengetahuan dan pendidikan bagi kaum dhuafa yakni:

*Pertama*, dengan cara mengirimkan guru-guru untuk ditempatkan ditengah masyarakat yang terisolir yang berada di wilayah-wilayah terpencil terutama guru-guru agama. Guru tersebut akan digaji melalui pengelolaan dana zakat produktif dalam pembagian asbab *Sabilillah*. Untuk memudahkan proses pemberian pengetahuan dan pendidikan kepada kaum dhuafa maka guru-guru tersebut diambil dari orang yang berasal dan bermukim didaerah tersebut dengan tujuan agar guru-guru tersebut mudah dan cepat berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti yang dilakukan didaerah Kabupaten Meranti, Indragiri Hulu dan Rokan Hilir dikirim guru-guru agama pada suku terasing, hal ini dilakukan tidak hanya karena kebanyakan dari mereka adalah orang yang lemah ekonomi namun juga dilatarbelakangi adanya dari mereka yang baru memeluk islam dan masih lemah didalam hal ilmu agama.<sup>1</sup>

Upaya penguatan pengetahuan dengan cara mengirimkan guru kedaerah terisolir ini belum bisa dilakukan secara merata ke seluruh pelosok dan menyebar

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul, tgl 4 januari 2013

luas di tiap kabupaten kota di Riau, hanya beberapa daerah saja dan tiap daerah diutus hanya satu atau dua orang guru disebabkan terbatasnya dana, namun upaya ini sudah ada seperti yang dipaparkan sebelumnya.<sup>2</sup>

*Kedua*, melalui Pemberian Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa, biaya pendaftaran, dan Peralatan sekolah. upaya ini dilakukan masih bersifat temporal dan terbatas dikarenakan banyaknya hal dan program lain yang harus dilaksanakan. Pemberian bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa banyak dilakukan melalui BAZ kabupaten / kota dengan menggunakan dana yang diturunkan setiap tahunnya. Sedangkan dilingkungan provinsi sendiri khususnya dikota pekanbaru dilakukan melalui masjid-masjid pada tiap kecamatan dan pemberian langsung bagi mereka yang mendatangi kantor Badan Amil Zakat Provinsi Riau.<sup>3</sup>

Pemberian bantuan pendidikan berupa biaya pendaftaran dan perlengkapan sekolah diberikan kepada anak-anak kaum dhuafa yang ingin melanjutkan kejenjang sekolah menengah. Mereka yang mendatangi kantor Badan Amil Zakat Provinsi Riau mengajukan permohonan dan akan dilakukan peninjauan apakah layak atau tidak menerima bantuan tersebut. setelah itu mereka akan diberikan bantuan pendaftaran kejenjang menengah disekolah yang mereka inginkan.<sup>4</sup>

*Ketiga*, melalui kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga atau yayasan pendidikan formal atau non formal yang mampu memberikan pemahaman dan pendidikan kepada kaum dhuafa. Penulis melihat Badan Amil Zakat Provinsi Riau memberikan bantuan pendanaan kepada Salah satunya yayasan yang bergerak

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Auni M. Noor, tgl 4 januari 2013

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Tri Kasbiati, tgl 4 januari 2013

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak musliadi, tgl 11 februari 2013

dibidang pembinaan kaum muallaf yakni Cahaya Iman Riau. Dengan kerjasama itu dapat memberikan pemahaman dan pendidikan dasar mengenai agama kepada para muallaf, karena seperti yang diketahui kaum dhuafa bukanlah mereka yang lemah fisik dan ekonomi saja tetapi termasuk juga lemah iman dan ilmu agama. Dan tidak jarang terkadang mereka para muallaf masuk didalam golongan yang lemah fisik, ekonomi dan ilmu agama.<sup>5</sup>

*Keempat*, mendirikan tempat-tempat yang menyelenggarakan pendidikan seperti rumah baca didaerah terisolir. Upaya ini masih dalam wacana yang disusun dalam program kerja Badan Amil Zakat dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan, khususnya bagi mereka yang berada didaerah terisolir yang membutuhkan sarana dan prasarana pendukung proses pemberian pengetahuan dan pendidikan.<sup>6</sup>

#### **b. Pemberian Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan**

Pemberian perlindungan dan pemenuhan kebutuhan merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan penguatan pengetahuan dan pendidikan, Dengan adanya perlindungan mereka merasa mendapatkan jaminan dan bisa bergerak dan berusaha tanpa memikirkan banyak hal lain yang harus mereka penuhi terlebih dahulu. Ada beberapa bentuk upaya pemberian perlindungan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau, Yaitu:

*Pertama* perlindungan Fisik, yakni perlindungan terhadap kesehatan kaum dhuafa berupa bantuan berobat. misalkan mereka yang berobat di RSUD Provinsi Riau, mereka akan diberikan bantuan berobat dan biaya transportasi serta

---

<sup>5</sup> Observasi, tgl 4 januari 2013

<sup>6</sup> Dokumentasi, tgl 11 februari 2013

makannya selama berada dirumah sakit tersebut. Namun tidak semuanya dapat dibantu karena keterbatasan persediaan pendanaan. Mereka yang datang ke Badan Amil Zakat Provinsi Riau mengajukan permohonan bantuan berobat akan di berikan bantuan melalui beberapa pertimbangan dan peninjauan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

*Kedua*, perlindungan sandang dan kebutuhan pangan, yakni perlindungan yang diberikan terhadap kebutuhan primer mereka seperti tempat tinggal atau rumah yang layak huni dan makanan sehari-hari. Perlindungan berupa tempat tinggal dilakukan oleh badan amil zakat provinsi riau melalui BAZ kabupaten, misalkan di Kabupaten Kuatan Sengingi dilakukan program rehabilitas rumah atau bedah rumah dari dana zakat yang disalurkan setiap tahunnya, supaya mereka memiliki rumah yang layak huni dan mereasa ada tempat untuk beerlindung. Sedangkan pemenuhan kebutuhan makanan pihak Badan Amil Zakat biasanya melakukan dalam bentuk Pemberian Dana Zakat Konsumtif yang bisa di gunakan langsung oleh kaum dhuafa berupa dana langsung atau bantuan sembako.<sup>8</sup>

*Ketiga*, perlindungan terhadap posisi dan kedudukan yakni perlindungan yang diberikan untuk menjaga ketentraman dan hak kaum dhuafa ditengah masyarakat. dengan cara memberikan mereka modal usaha produktif yang tujuannya melepaskan mereka dari jeratan para rentenir yang juga meminjamkan modal kepada mereka. Dikarenakan kelemahan ekonomi tidak jarang mereka terkadang menjadi objek dan incaran pihak yang ingin mencari keuntungan besar

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul, tgl 4 januari 2013

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul, tgl 4 januari 2013

seperti para rentenir yang berujung apabila mereka tidak dapat membayarnya akan membahayakan posisi mereka ditengah masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam bentuk wacana, upaya pemberian perlindungan terhadap kaum dhuafa tersusun dalam program kerja Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam program Riau Peduli berupa bantuan tenda pengungsian dan pakaian bagi mereka yang terkena musibah dan pada Riau Sehat berupa perlindungan fisik, bantuan kesehatan pengobatan gratis, alat bantu bagi penyandang cacat dan sebagainya.<sup>10</sup>

### **c. Pemberian motivasi dan dukungan**

Motivasi adalah pemberian semangat dan support untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, hal ini diperlukan untuk membangkitkan semangat dan gairah seseorang dalam melakukan kegiatan. Begitu juga mereka para kaum dhuafa yang dikenal lemah dalam berbagai hal sangatlah memerlukan motivasi dari orang sekitarnya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Provinsi Riau melakukan pemberian motivasi dan dukungan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

*Pertama*, pendekatan Personal yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati atau mendatangi mereka para dhuafa satu persatu. Pendekatan ini dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam peninjauan terhadap mustahik atau kaum dhuafa yang akan dibantu melalui rekomendasi masjid-masjid. Mereka akan didatangi oleh tim yang sengaja diutus untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada mereka supaya tetap bersemangat menjalani kehidupan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Auni M. Noor, tgl 4 januari 2013

<sup>10</sup> Dokumentasi, tgl 11 Februari 2013

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul tgl 4 januari 2013



*Kedua*, pendekatan kelompok dilakukan khusus untuk mereka yang berada di pekanbaru, mereka yang akan mendapatkan bantuan secara berkelompok yang sudah dibentuk oleh masjid-masjid akan di panggil ke kantor dan akan diadakan pemberian pengarahan yang akan memotivasi mereka dalam menjalankan usaha sehari-hari. Untuk mereka yang berada di kabupaten kota maka akan diturunkan tim setelah mendapat rekomendasi dari BAZ kabupaten/kota<sup>12</sup>

*Ketiga*, pendekatan tidak langsung yakni motivasi yang diberikan melalui perantara suatu hal. Seperti bantuan dalam bentuk materiil bisa memberikan motivasi bagi mereka untuk tetap menjalankan kehidupan secara normal, misalkan bantuan dana bisa memotivasi mereka untuk melakukan usaha, bantuan peralatan dan perlengkapan kerja bisa memotivasi mereka supaya lebih giat berusaha, bantuan lainnya seperti beasiswa walaupun masih bersifat esidentil juga bisa memotivasi mereka dalam belajar atau bantuan biaya pengobatan dan peralatan kesehatan juga mampu mengangkat semangat mereka tetap bisa menjalani kehidupan.<sup>13</sup>

#### **d. Pemberian Bimbingan dan Pelatihan**

Pemberian Bimbingan dan Pelatihan dilakukan bertujuan untuk memberikan mereka modal skil dan pengalaman sebelum melakukan kegiatan usaha supaya kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan mencapai hasil yang baik. Badan Amil Zakat Provinsi Riau melakukan beberapa cara dalam memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap kaum dhuafa, yaitu:

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Musliadi, tgl 11 februari 2013

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Musliadi tgl 4 januari 2013

*Pertama*, membuat lembaga yang memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap kaum dhuafa. Upaya ini diwujudkan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dengan membuat BAZ Center, yang bertujuan untuk membimbing dan memberikan pemahaman tentang wira usaha. Disana juga bisa dijadikan tempat penciptaan dan pelatihan bagi kaum dhuafa untuk memungkinkan potensi mereka berkembang, karena tujuan dari hal ini adalah untuk melatih mereka supaya jadi produktif dan tidak selamanya bergantung pada orang lain.<sup>14</sup>

*Kedua*. Melalui jasa konsultasi langsung yakni pemberian arahan yang bersifat tatap muka mengenai pemanfaatan dana produktif yang akan diberikan kepada kaum dhuafa. Biasanya mereka yang datang ke kantor mengajukan permohonan baik itu mereka yang datang secara pribadi maupun datang membawa nama organisasi tertentu mendapatkan konsultasi dan bimbingan mengenai pemanfaatan bantuan dana zakat secara produktif.<sup>15</sup>

*Ketiga*, melalui persentasi individu dan kelompok. yakni pemberian bimbingan dan pelatihan dalam bentuk arahan langsung kepada kaum dhuafa. Secara individu mereka akan didatangi langsung dalam kegiatan survei dan secara berkelompok mereka dipanggil ke kantor Badan Amil Zakat Provinsi Riau dan akan diberikan bimbingan dalam bentuk pengarahan langsung tentang pemanfaatan dana produktif untuk dimanfaatkan sebaik mungkin.<sup>16</sup>

*Keempat*, bekerjasama dengan organisasi atau lembaga pelatihan guna memberikan modal skill dan kemampuan. Upaya ini dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Riau melalui kerjasama dengan organisasi kewanitaan untuk memberikan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Auni M. Noor, tgl 4 januari 2013

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Tri kasbiati, tgl 4 januari 2013

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul, tgl 4 januari 2013

keterampilan kepada kaum ibu berupa keterampilan menjahit dan bimbingan tentang wira usaha dan home industry. Hal ini dilakukan sebelum diberikan bantuan dalam bentuk modal dan peralatan usaha, mereka sudah memiliki skil dan keahlian yang memungkinkan usaha yang akan dilakukan berhasil dan berjalan efektif sesuai dengan rencana.<sup>17</sup>

*Kelima*, melalui penempatan pelatihan ketempat yang bisa mengajarkan dan memberikan skil terhadap kaum dhuafa seperti perbengkelan, usaha jahit, pabrik, dan tempat-tempat usaha kecil lainnya. Hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau melalui BAZ kabupaten / kota melalui dana yang diturunkan tiap tahunnya. Misalkan dikuantan seninggi dilakukan penempatan pelatihan bagi kaum dhuafa di perbengkelan dengan tujuan memberikan pelatihan dan pemahaman supaya nanti ia bisa menjalankan usaha perbengkelan dengan baik dan benar.<sup>18</sup> Hal yang sama juga dilakukan dalam bentuk penempatan ditempat kursus stir mobil bagi mereka yang menginginkan bekerja dibidang tersebut. setelah mereka diberikan pelatihan tersebut lalu mereka akan di berikan SIM yang bertujuan untuk menunjang keahlian yang mereka miliki.<sup>19</sup>

Upaya pemberian bimbingan dan pembinaan juga tercantum didalam program kerja Badan Amil Zakat Provinsi Riau yakni pada Program Riau Makmur berupa memberikan bimbingan dan keterampilan dalam bentuk pendidikan, penataran, serta pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang usaha.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Syamsul, tgl 4 januari 2013

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul, tgl 4 januari 2013

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak musliadi, tgl 11 februari 2013

<sup>20</sup> Dokumentasi, tgl 11 Februari 2013

#### **e. Pemberian Bantuan usaha atau Pekerjaan**

Pemberian bantuan sosial atau pekerjaan merupakan langkah paling ideal memberdayakan kaum dhuafa, karena mereka pada umumnya lemah dalam hal ekonomi, maka dari itu diperlukan bantuan usaha baik dalam bentuk modal usaha atau peralatan usaha maupun pemberian pekerjaan agar mereka dapat berusaha dalam menjalani kehidupan ini. Untuk upaya ini Badan Amil Zakat Provinsi Riau melakukan dalam beberapa bentuk program yaitu:

*Pertama*, bantuan dalam bentuk modal usaha. Hal ini merupakan program pokok dan paling banyak dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam memberdayakan kaum dhuafa, karena tidak dapat dipungkiri masalah yang paling serius yang dialami kaum dhuafa adalah masalah kebutuhan finansial dan pemenuhan ekonomi mereka.<sup>21</sup> Pemberian modal usaha ini dibagi dalam dua bentuk yakni dana tunai dan barang-barang. Dana tunai diberikan sebagai modal pertama untuk membuat usaha seperti membuka kedai sembako dan pemberian modal dalam bentuk barang diberikan sebagai perlanjutan dari usaha yang telah ada, misalnya orang yang memiliki kedai tetapi barang yang dijual tidak terlalu banyak maka akan diberikan modal dalam bentuk pengisian barang-barang pada usaha tersebut.<sup>22</sup>

Bantuan dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau disalurkan melalui Masjid-masjid yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Provinsi Riau dan seluruh BAZ Kabupaten / Kota di provinsi Riau. Seperti pada tahun ini Badan Amil Zakat Provinsi menyalurkan dana

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Tri Kasbiati, tgl 4 Januari 2013

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsu, tgl 4 Januari 2013

bejumlah 100 Juta Rupiah di Tiap-tiap Kabupaten / Kota. Dana tersebut hampir keseluruhannya disalurkan untuk bantuan dan modal usaha produktif.<sup>23</sup>

*Kedua*, penyediaan sarana dan prasarana. Upaya ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam bentuk pemberian peralatan dan perlengkapan usaha dengan tujuan membantu kaum dhuafa dalam penyediaan sarana dan diberikan kepada mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk melakukan usaha atau masih menumpang atau memakai sarana orang lain, misalkan para nelayan diberi bantuan alat penangkapan ikan, para petani diberikan alat-alat untuk bertani, para pedagang diberikan modal usaha dan barang-barang yang bisa membantu mereka seperti gerobak dorong, pendirian tempat usaha dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

*Ketiga*, perbaikan sarana dan prasarana. Upaya ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam bentuk perbaikan peralatan dan perlengkapan dan diberikan kepada mereka yang sudah memiliki peralatan atau sarana untuk melakukan usaha tetapi tidak memadai atau mengalami kerusakan. Misalnya memperbaiki kedai atau warung, Hal ini dilakukan supaya kaum dhuafa terbantu baik dalam modal maupun peralatan yang bertujuan supaya mereka mandiri dan tidak terus menerus menggantungkan hidup dengan orang lain serta bisa jadi mustahik yang produktif sampai mereka berhasil dan bertukar posisi menjadi Muzakky.<sup>25</sup>

*Keempat*, pemberian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Dalam skala besar seperti perekrutan dan pembukaan lapangan pekerjaan secara resmi dan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan ibu Hilma, 15 Februari 2013

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud, tgl 4 Januari 2013

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud, tgl 4 Januari 2013

besar, upaya ini belum bisa dilakukan oleh badan Amil Zakat Provinsi Riau namun, dalam skala kecil sudah ada upaya dengan melakukan perekrutan tenaga relawan yang bekerja di Badan Amil Zakat Provinsi Riau dan pengangkatan tenaga guru untuk daerah terisolir merupakan penyediaan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh badan Amil Zakat Provinsi Riau.<sup>26</sup> Langkah lainnya dalam pemberian pekerjaan Melalui pemberian bantuan modal usaha, penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana kepada kaum dhuafa yang belum memiliki pekerjaan.<sup>27</sup>

#### **f. Melakukan Pengawasan**

Setelah semua upaya dilakukan mulai dari pemberian pendidikan, motivasi, bantuan riil, dan bimbingan maka hal yang harus dilakukan ialah pengawasan terhadap semua upaya pemberdayaan tersebut. pengawasan dilakukan bertujuan untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan apakah berjalan efektif atau tidak. Ada dua pendekatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam Melakukan Pengawasan, yaitu:

*Pertama.* Pengawasan secara langsung. yakni pengawasan yang dilakukan melalui survei dan peninjauan langsung di lapangan oleh tim yang telah ditunjuk untuk melakukannya. Pengawasan secara langsung ini dilakukan dalam dua tahap yakni sebelum dan sesudah pelaksanaan upaya pemberdayaan dilakukan. hal ini

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak musliadi, tgl 11 februari 2013

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak syamsul, tgl 4 januari 2013

dilakukan supaya usaha yang dijalani sesuai dengan harapan dan berjalan dengan baik dan efektif.<sup>28</sup>

Pengawasan langsung yang dilakukan sebelum pemberian bantuan dilakukan ketika tim survei turun melihat kondisi dan tempat orang telah direkomendasikan oleh pihak Masjid dan BAZ Kabupaten / Kota dan pengawasan langsung yang dilaksanakan sesudah bantuan diberikan dilakukan dengan melihat usaha yang telah dilakukan oleh kaum dhuafa yang telah diberikan bantuan apakah usahanya berjalan dengan baik atau tidak. Pengawasan langsung yang dilakukan setelah diberikan bantuan ini akan terus dilaksanakan dalam tiga bulan sekali.<sup>29</sup>

*Kedua*, Pengawasan tidak langsung yakni pengawasan yang dilakukan melalui perantara pihak lain atau laporan tertulis. Dalam hal ini pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau melalui laporan tertulis yang dibuat oleh pihak BAZ kabupaten / kota, Masjid dan laporan tertulis dari tim survei.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak musliadi tgl, 11 februari 2013

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak musliadi tgl, 11 februari 2013

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak musliadi tgl, 11 februari 2013

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Setelah penulis melakukan penyajian data pada Bab III, selanjutnya penulis akan menganalisis data yang sudah penulis dapatkan dalam penelitian ini, untuk mengetahui Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis Diskriptif Kualitatif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggambarkan data ril yang penulis dapatkan ditempat penulis melakukan penelitian, untuk lebih jelas data tersebut penulis analisis sebagai berikut:

#### **4.1 Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau**

Analisis penulis tentang Penguatan pengetahuan dan pendidikan yang dilakukan oleh badan Amil Zakat Provinsi Riau melalui pengiriman guru kedarah terisolir adalah langkah yang baik untuk dilakukan dalam pemberdayaan kaum dhuafa. Seperti yang dikatakan dalam Edi Suharto, bahwa penguatan pengetahuan dan pendidikan dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Apalagi mereka yang berada didaerah yang terpencil biasanya mengalami kelemahan dalam berbagai hal dibandingkan mereka yang berada didaerah yang sudah maju. walaupun hal ini belum dilakukan secara merata oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau, namun strategi ini menurut penulis sudah cukup baik untuk memberikan pemahaman dan pendidikan pada kaum dhuafa, apalagi guru tersebut diambil dari daerah yang



akan ditempatkan tersebut, hal ini akan lebih mempermudah proses pemberian pengetahuan dan pendidikan dan guru tersebut bisa cepat beradaptasi dengan lingkungannya.

Pemberian bantuan biaya pendidikan berupa Beasiswa, biaya pendaftaran, dan Peralatan sekolah adalah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam upaya penguatan pengetahuan dan pendidikan kepada anak kaum dhuafa, menurut penulis masalah pemberian bantuan pendanaan merupakan hal yang efektif dan perlu dilakukan dalam upaya penguatan pengetahuan dan pendidikan, Faktor dana sangat mempengaruhi pendidikan apalagi mereka para kaum dhuafa yang memang lemah dibidang materi. Sangat memungkinkan permasalahan ini bersifat timbal balik antara pendidikan dan ekonomi. Lemah ekonomi bisa meyebabkan lehanya pendidikan dan sebaliknya pendidikan sulit didapatkan disebabkan lemahnya ekonomi. jadi bantuan biaya Pendidikan adalah cara yang cukup baik dilakukan dalam pemberian pengetahuan dan pendidikan terhadap kaum dhuafa.

Kerjasama dengan pihak lain merupakan langkah yang efektif dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada kaum dhuafa, karena dalam upaya ini harus melibatkan banyak pihak untuk mempercepat proses pemberian pengetahuan dan pendidikan. Sudah sangat tepat cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau Bekerjasama dengan Yayasan pendidikan seperti Yayasan Cahaya Iman Riau yang memberikan pengetahuan dan pendidikan agama dasar kepada para mualaf. Seperti yang diketahui bahwa kaum dhuafa

bukan hanya mereka yang lemah ekonomi, dan fisik saja termasuk lemah iman dan ilmu pengetahuan.

Wacana Badan Amil Zakat Provinsi Riau untuk membuat tempat-tempat yang menyelenggarakan pendidikan, seperti rumah baca di daerah terisolir adalah program yang bagus. masalah kelemahan pendidikan di daerah terpencil ialah keterbatasan bahan bacaan dan buku-buku yang bisa menunjang proses pendidikan. Namun hal ini harus segera di wujudkan dalam bentuk nyata dan tidak sebatas wacana dan program.

Analisis Penulis mengenai program pemberdayaan kaum dhuafa melalui upaya pemberian perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kaum dhuafa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau berupa perlindungan fisik, sandang pangan dan posisi kaum dhuafa ditengah masyarakat adalah upaya yang cukup baik, seperti yang dikatakan dalam Muksin, bahwa pemberdayaan terhadap kaum dhuafa harus bisa membangkitkan harga diri dalam bentuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. karena faktor kesehatan, kebutuhan sandang pangan dan kedudukan sangat mempengaruhi produktifitas seseorang. namun upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diatur dengan lebih baik lagi,

Penulis berpandangan, permasalahan kesehatan dan kebutuhan sandang pangan adalah hal yang saling berkaitan dan merupakan permasalahan yang membentuk mata rantai. Kesehatan fisik berpengaruh bagi aktivitas pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan apabila kebutuhan sandang pangan tidak terpenuhi akan mengakibatkan pada faktor kesehatan fisik. Jadi jelaslah bahwa upaya yang

dilakukan oleh badan Amil Zakat Provinsi Riau berupa biaya berobat, perbaikan rumah, dan bantuan makanan adalah hal yang sangat penting dilakukan dalam pemberdayaan kaum dhuafa.

Kedudukan dan posisi kaum dhuafa ditengah masyarakat merupakan hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan karena hal ini akan berimbas pada kebutuhan sandang pangan bahkan keamanan dan kenyamanan. Mereka para dhuafa yang mengalami kelemahan dalam berbagai hal terutama dibidang ekonomi sering dijadikan sasaran atau objek suatu pihak yang ingin mengambil keuntungan dari keadaan yang sedang mereka alami, misalkan tempat atau lokasi kediaman mereka yang tergadai bisa saja menggeser posisi mereka ditengah masyarakat. Jadi sudah sangat bagus program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Riau memberikan bantuan dana produktif untuk membela hak dan melepaskan Kaum dhuafa dari jeratan para rentenir.

Analisis penulis tentang Program pemberdayaan kaum dhuafa melalui pemberian motivasi dan dukungan kepada Kaum duafa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau melalui pendekatan personal, kelompok dan tidak langsung merupakan pendekatan yang sangat efektif dan bisa menumbuhkan semangat etos kerja mereka, seperti yang dikatakan dalam Sudarmayanti, bahwa pemberdayaan harus menekan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar memiliki kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang jadi pilihan hidupnya. Secara personal mereka memerlukan orang selalu memperhatikannya. Melalui pendekatan personal pihak Badan Amil Zakat Provinsi Riau bisa mengetahui sifat dan watak mereka secara pribadi,

Sehingga mempermudah proses pemberian motivasi dan kita bisa memberikan bantuan yang sesuai dengan keinginan dan keahliannya.

Pemberian motivasi dengan pendekatan kelompok juga memiliki peran yang cukup penting dalam memberdayakan kaum dhuafa. Dengan berkelompok mereka akan merasa bersemangat untuk melakukan usaha penghidupan dan bisa memupuk semangat kebersamaan. Namun hal ini perlu sikap yang bijak dari orang diberikan motivasi karena secara kelompok motivasi yang diberikan dalam bentuk arahan oleh motivator tidak semuanya bisa ditanggap oleh kelompok tersebut dan pendekatan ini juga motivator kurang mengetahui watak mereka yang diberikan motivasi secara pribadi.

Motivasi yang diberikan secara tidak langsung memiliki peran yang tidak kalah penting, seperti yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam bentuk dana dan peralatan usaha. pemberian bantuan secara tidak langsung ini bisa merangsang semangat dan etos kerja kaum dhuafa untuk melakukan kegiatan penghidupan dengan lebih baik.

Sebelum bantuan usaha atau pekerjaan diberikan, mereka yang akan diberdayakan perlu diberikan bimbingan dan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan modal skill dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan dan supaya usaha yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keahlian yang telah dimiliki. Hal ini dikatakan dalam Edi Suharto, bahwa dalam pendekatan mikro pemberdayaan dapat dilakukan melalui bimbingan yang bertujuan melatih individu dalam menjalankan tugas keseharian. Analisis penulis tentang mengenai pemberian bimbingan terhadap kaum dhuafa yang dilakukan oleh Badan Amil

Zakat Provinsi Riau sudah cukup baik namun perlu penerapan yang lebih serius dan berkelanjutan.

Dengan membuat sebuah lembaga, proses pemberian bimbingan dan pelatihan akan lebih mudah dan efektif, karena melalui lembaga tersebut pihak Badan Amil Zakat Provinsi Riau dapat melakukan banyak pendekatan. seperti jasa konsultasi langsung secara individu maupun pengarahan kepada kelompok yang biasanya dilakukan di kantor dapat dilakukan dilembaga tersebut. kemudian daripada itu melalui lembaga pelatihan tersebut Badan Amil Zakat Provinsi Riau bisa membuat program pelatihan yang sesuai dengan kemampuan serta keinginan kaum dhuafa yang diberdayakan.

Kerjasama dengan pihak lain juga merupakan langkah yang efektif dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada kaum dhuafa. Selaku makhluk sosial sudah pasti memerlukan orang lain dalam melaksanakan aktivitas kehidupan, dengan bantuan orang lain suatu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan sendirian akan dapat diselesaikan dengan mudah dan efektif. Seperti yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Riau melalui kerjasama dengan organisasi kewanitaan untuk memberi bimbingan kepada kaum ibu merupakan upaya yang cukup baik dalam memberikan modal skil dan keterampilan sebelum mereka menempuh dunia usaha. Penempatan belajar ditempat-tempat usaha mandiri juga dapat membantu proses bimbingan dan pelatihan bagi kaum dhuafa sebelum mereka melakukan kegiatan usaha sendiri. Disana mereka dapat belajar bagaimana menjalankan usaha dengan baik serta memiliki skil yang sesuai dengan profesinya.

Analisis penulis tentang pemberdayaan kaum dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau melalui bantuan usaha atau pekerjaan merupakan tahap aplikasi dari upaya yang telah diberikan sebelumnya. bantuan usaha adalah langkah yang sangat baik dilakukan dalam pemberdayaan kaum dhuafa karena menurut penulis memberikan kail lebih tepat dan lebih baik daripada memberikan ikan. seperti yang dikatakan dalam Muksin, bahwa pemberian pekerjaan kepada kaum dhuafa bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari permasalahan kehidupan. Hal ini tentu ditujukan kepada kaum dhuafa yang belum memiliki usaha dan pekerjaan karena tidak ada satu usaha pun yang tidak memerlukan modal apalagi mereka yang lemah dibidang financial sangat membutuhkan modal untuk memulai usaha.

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam melakukan kegiatan usaha, adalah sangat tepat uapaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau selain memberikan modal usaha Badan Amil Zakat juga memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan usaha. Hal ini tepatnya diberikan kepada mereka yang belum memiliki sarana dan prasarana, bagi mereka yang sudah memiliki sarana dan prasarana baiknya dilakukan perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana Seperti yang dilakukan oleh badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam bentuk perbaikan tempat dan peralatan usaha kaum dhuafa.

Penyediaan lapangan pekerjaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Riau berupa perekrutan tenaga relawan yang bekerja di Badan Amil Zakat Provinsi Riau dan pengangkatan tenaga guru untuk daerah terisolir menurut penulis bukanlah pemberian pekerjaan terhadap kaum dhuafa, terkecuali tenaga relawan dan guru yang diangkat tersebut termasuk dalam golongan kaum dhuafa.

Penulis lebih memandang pemberian pekerjaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui beberapa upaya diatas, seperti modal usaha bagi yang belum memiliki pekerjaan secara otomatis telah memberikan pekerjaan sebagai sumber pendapatannya, pemberian dan perbaikan sarana dan prasarana untuk melakukan usaha juga secara tidak langsung sudah memberikan pekerjaan kepada kaum dhuafa.

Analisis penulis tentang pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Riau terhadap semua upaya yang telah dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung adalah sistem pengawasan yang bagus dan efektif, karena seperti yang dikatakan dalam Jonny Purba, sebagai suatu proses pengawasan merupakan kegiatan untuk melihat kosekuensi kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi. Namun menurut penulis kedua pendekatan ini menurut penulis memiliki kelebihan dan kecendrungan masing-masing.

Dari segi kualitas Pengawasan yang dilakukan secara langsung lebih baik daripada pengawasan tidak langsung karena dengan pengamatan langsung pihak Badan Amil Zakat Provinsi Riau bisa mengetahui kejadian dan perkembangan secara ril dilapangan dan dapat mengetahui hasil yang sesungguhnya terjadi. Apalagi pengawasan yang dilakukan secara langsung ini dilaksanakan sebelum dan sesudah pemberian bantuan, dapat mengetahui keadaan sebelum dan sesudah upaya dilakukan. Namun pengawasan secara langsung memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak daripada pengawasan tidak langsung.

Pengawasan yang tidak langsung lebih mudah dilakukan karena hal ini bisa dilakukan melalui perantara dan informasi yang didapatkan dari laporan kegiatan. Pendekatan ini secara waktu memang lebih efektif dan efisien namun perlu pengamatan dan analisa yang lebih mendalam dari laporan yang didapatkan karena secara tidak sadar pengawasan tidak langsung ini bisa dirubah dan dimanipulasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah penulis paparkan pada Bab III dan Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau sudah cukup baik, yakni dengan memberikan bantuan Modal Usaha Produktif. Sebagai sebuah proses Program pemberdayaan ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dimulai dengan upaya pengetahuan dan pendidikan melalui pengiriman guru-guru kedaerah terisolir, bantuan pendidikan dan penanaman ilmu agama bagi para mualaf, Pemberian perlindungan terhadap mereka yang lemah berupa perbaikan rumah dan biaya berobat serta pemenuhan kebutuhan sandang pangan. pemberian motivasi yang dilakukan dengan pendekatan personal dan kelompok. pemberian bimbingan dan arahan melalui kerjasama dengan pihak lain berupa pelatihan, kursus dan pengarahan langsung supaya mereka memiliki skil dan keterampilan sebelum menjalankan usaha sehingga bantuan yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, pemberian bantuan modal usaha dan pekerjaan dan pengawasan terhadap program yang telah dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan walaupun sitemnya sudah cukup bagus namun masih terdapat kekurangan dari Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam memberdayakan kaum dhuafa, maka dari itu saran penulis sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Provinsi Riau hendaknya lebih meningkatkan upaya penguatan pengetahuan dan pendidikan bagi kaum dhuafa karena factor pendidikan sangat mempengaruhi produktifitas dan cara mereka menyikapi persoalan hidup.
2. Badan Amil Zakat Provinsi Riau hendaknya melakukan motivasi kepada kaum dhuafa secara berkelanjutan
3. Badan Amil Zakat Provinsi Riau hendaknya dapat memberikan perlindungan dan kebutuhan secara merata
4. Badan Amil Zakat Provinsi Riau hendaknya melakukan pelatihan yang sesuai dengan keahlian kaum dhuafa
5. Badan Amil Zakat Provinsi Riau hendaknya meningkatkan upaya pemberian bantuan usaha dan pekerjaan supaya kaum dhuafa dapat melakukan usaha dengan baik
6. Badan Amil Zakat Provinsi Riau hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap semua upaya yang telah dilakukan supaya hasilnya lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta : 1988
- Asnaini, DKK. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, Rineka cipta. Jakarta: 2010
- Badan Amil Zakat Provinsi Riau, *Buku Profil*, 2011
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Refika Aditama, Bandung: 2005
- Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya. Apollo, 2004
- Hafidhudin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta: 2002.
- Kadar, *Pembelaan Al-Quran Kepada kaum Tertindas*, AMZAH, Jakarta: 2005
- Maulatul Maghfutoh, *Zakat*, PT. Pustaka Insan Madani, Yogyakarta:2007
- Muksin, M.K. *Menyayangi Dhuafa*, Gema Insani Press, Jakarta: 2004
- Michael Sharraden, *Aset Untuk Orang Miskin*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta : 2003
- Makmur, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta: 2007
- Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S.. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta: 1996
- Qaradhawi Yusuf, *Spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan* (terjemahan), Zikrul Hakim, cet: 1. Jakarta : 2005
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat*, Pustaka Litera AntarNusa, cet:12. Bogor : 2011
- Sulistiani Tegar Ambar, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media. Yogyakarta: 2004

Sudarmayanti, *Rekonstruksi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk menghadapi Dinamika perubahan lingkungan*, Mandar Maju, Bandung: 2000

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif , kualitatif dan R&D*, Alfabeta, cet. 12, Bandung: 2011

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2006

Wrihatnolo Randi R. DKK, *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah pengantar panduan untuk pemberdayaan masyarakat*, Elex Media Koputindo Jakarta: 2007